

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
KEMENTERIAN SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL
KOTA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH :

FINA ERIA NASUTION

NPM : 1503100017

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : FINA ERIA NASUTION
NPM : 1503100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : 08.30 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH, MM
PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

(
.....
.....
.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

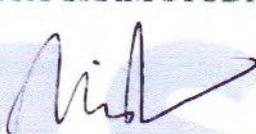
Nama : FINA ERIA NASUTION
NPM : 1503100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

Medan, 18 September 2019

PEMBIMBING


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, FINA ERIA NASUTION, NPM 1503100017, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019
Yang Menyatakan



FINA ERIA NASUTION
NPM. 1503100017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

EINA ERIA NASUTION

NPM : 1503100017

Dinas Sosial adalah salah satu bagian kinerja dari Pemerintah Kabupaten Kota dalam penanganan pengemis, anak jalanan, gelandangan, lansia dan sejenisnya. Tujuan dibentuknya Dinas Sosial tersebut adalah untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku atau penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial serta membangun demokrasi dan keadilan sosial. Dinas Sosial bekerja dengan sepenuh hati melakukan pelayanan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan agar tidak ada lagi anak-anak yang tinggal dijalanan, para lansia yang menjadi pengemis di jalanan serta adanya pihak-pihak lain yang memanfaatkan para fakir miskin tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai. Penulis menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang kompleks mengenai implementasi kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai. Narasumber penelitian adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai, Kepala Bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Binjai dan fakir miskin yang mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai telah mencapai target dari perencanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian target tersebut berkisar 80-90%. Adapun pelayanan sosial dan bantuan pokok yang telah terlaksana dengan baik adalah pelayanan kesehatan dan obat-obatan *generik* gratis di puskesmas, klinik dan posyandu, bantuan sembako kepada para lansia dan keluarga tidak mampu serta bantuan pendidikan dan rehabilitasi bagi anak-anak jalanan dan anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Kementerian, Dinas Sosial & Penanggulangan Fakir Miskin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI”**.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda saya Mansyur Nasution & Ibunda saya Elly wiyah**, serta **Saudara Kandung Saya Maharani Pancasari, Ummi Fadilah, Buchori, Faisal Nasution, Fika Maysaroh Nasution Amd** yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terima kasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- 2 Bapak Dr. Rudianto S.Sos M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Arifin Saleh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4 Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom.
- 5 Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Abrar Adhani M.I.Kom.
- 6 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ibu NalilKhairiah S.IP., M.Pd.
- 7 Bapak Dr. Arifin Saleh selaku Dosen pembimbing saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8 Kepada tempat penelitian penulis yakni Dinas Sosial Kota Binjai yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan riset penelitian terkait dengan judul skripsi Penulis.
- 9 Kepada biro Fisip UMSU dan para staffnya yang membantu saya dalam hal pemberitahuan informasi dan membantu kelengkapan berkas-berkas perkuliahan saya.
- 10 Ponakan tersayang Daffa, Syachfa, Dani,Aqifa,Fiona,Asyifa,Abizard dan Adrena terimakasih sudah menghibur saat penat dan letih.

- 11 Kepada Sahabat saya Giska Ananda Pratama terimakasih sudah membantu saya mengerjakan skripsi ini.
- 12 Kepada yang terkasih Luqman Nul Hakim terimakasih sudah memberi semangat dan waktunya untuk saya

Medan, September 2019

Penulis :

FINA ERIA NASUTION

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	7
2.1.1. Pengertian Implementasi	7
2.1.2. Teori Implementasi Mode Matland.....	9
2.1.3. Pengertian Kebijakan	11
2.1.4. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.1.5. Pengertian Implementasi Kebijakan	15
2.1.6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	17
2.2. Peraturan Kementerian.....	19
2.3. Fakir Miskin	20
2.3.1. Pengertian Fakir Miskin.....	20
2.3.2. Faktor-Faktor Penyebab Kefakiran	21
2.3.3. Ciri-Ciri Fakir Miskin	23
2.3.4. Cara Mengatasi Kefakiran.....	24
2.4. Dinas Sosial.....	26
2.4.1. Pengertian Dinas Sosial.....	26
2.4.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial	26
BAB III METODE PENELITIAN	30

3.1. Metode Penelitian.....	30
3.2. Kerangka Konsep.....	30
3.3. Definisi Konsep.....	31
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	32
3.5. Narasumber Penelitian	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Teknik Analisis Data.....	35
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
3.8.1. Lokasi Penelitian.....	37
3.8.2. Waktu Penelitian	37
3.8.3. Deskripsi Lokasi Penelitian	38
3.8.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Binjai	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.1.1. Analisis Hasil Penelitian	41
4.2. Implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial nomor 13 tahun 2011	42
4.3. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinas Sosial adalah salah satu bagian kinerja dari Pemerintah Kabupaten Kota dalam penanganan pengemis, anak jalanan, gelandangan, lansia dan sejenisnya. Tujuan dibentuknya Dinas Sosial tersebut adalah untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku atau penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial serta membangun demokrasi dan keadilan sosial. Dinas Sosial bekerja dengan sepenuh hati melakukan pelayanan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan agar tidak ada lagi anak-anak yang tinggal dijalanan, para lansia yang menjadi pengemis di jalanan serta adanya pihak-pihak lain yang memanfaatkan para fakir miskin tersebut.

Dinas Sosial merupakan sebuah organisasi yang berdiri secara legal di bawah Pemerintahan Daerah sebagai sebuah unsur pelaksana pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mengembang peran penting dalam membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas sosial mengembang peran penting untuk perumusan kebijakan bidang sosial, pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup

tugasnya. Kemudian pelaksanaan fungsi lain yang dijalankan oleh Dinas Sosial diberikan oleh Bupati masing-masing daerah. Salah satu yang menjadi tugas pokok utama Dinas Sosial adalah memberdayakan fakir miskin.

Dinas sosial juga mempunyai tugas yakni melaksanakan sebagian tugas umum dari pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi yakni : sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah sesuai tugas dan fungsinya.

Pada Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011, di jelaskan jika fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Tujuan akhir yang akan dicapai di Kementerian Sosial tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah : meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan

kelompok marjinal lainnya serta meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan ini ada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Kemudian, seorang kepala keluarga yang kartu keluarganya (KK) telah terdaftar sebagai fakir miskin di Kecamatan, wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang sejenis di daerah tempat tinggalnya. Karena pendataan adalah hal yang paling penting untuk bantuan sosial yang akan didapat nantinya.

Dinas Sosial Kota Binjai juga telah berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti sekolah kebidanan, pada dokter-dokter muda dan lainnya agar dapat melakukan observasi dan penanganan terhadap para fakir miskin. Melakukan pendataan ke rumah-rumah di Kota Binjai agar para masyarakat kurang mampu mendapat bantuan yang layak. Bantuan yang diberikan dapat berupa sandang pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan masih banyak lagi. Dana tersebut dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan para fakir miskin.

Namun, hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Adanya hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan seperti anggaran dana yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dan pelayanan sosial bagi seluruh fakir miskin di Kota Binjai menjadi faktor utama tidak terealiasinya dan pembagian merata bagi

seluruh fakir miskin di Kota Binjai. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih tentang **“implementasi kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas yakni : bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin di Dinas Sosial Kota Binjai?.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan kementerian sosial nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin di Dinas Sosial Kota Binjai.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut member manfaat. Adapun manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini yakni :

- a) Untuk melatih diri dan menambah wawasan bagi penulisan dalam melaksanakan perintah Negara serta mengelola fakir miskin di Kota Binjai.

- b) Bagi Dinas Sosial Kota Binjai, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pimpinan serta pegawai apakah implemetasi sudah berjalan dengan baik atau tidak.
- c) Penelitian diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5. Sitematika Penulisan

BAB I (PENDAHULUAN)

Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II (URAIAN TEORITIS)

Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang pengertian dari Implementasi, Kebijakan, Implementasi, Implementasi Kebijakan Publik, Dinas Sosial Dan Fakir Miskin.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber penelitian, kategorisasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian

BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)

Berisikan analisis data yang menguraikan penyajian data dan hasil jawaban narasumber serta pembahasan data.

BAB V (PENUTUP)

Berisikan Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi secara umum dapat diketahui dalam kamus besar Bahasa Indonesia dan di artikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan dari sebuah aturan-aturan, artinya yang dilaksanakan dan di terapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau di *design* untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Kemudian, penulis juga menjabarkan pendapat lain dari para ahli, yakni Browne (2004:70), yang mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Tachan (2006:24) juga mengatakan bahwa Implementasi adalah suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan saran (alat) untuk memperoleh hasil.

Harsono (2002:67) juga ikut serta mengemukakan, bahwa Implementasi juga suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan Syauckani dkk (2004:295), juga mengemukakan pendapatny bahwa Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan ditujukan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti yang diharapkan dan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

Dunn (yang dikutip dalam Syaukani, 2004:296), mengemukakan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan oleh individu, pejabat pemerintahan ataupun swasta. Kemudian, Susilo (2007:174) juga menyebutkan Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, peraturan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis yang disusun secara terperinci sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang di inginkan. Wahab (yang dikutip dalam Winarno, 2012:146), juga menjelaskan jika Implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan bahan peradilan.

Wahab (2004:64) mengemukakan konsep dasar pengertian Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Kemudian, dalam kamus besar dari *Lexicon Webster Dictionary*, mengemukakan bahwa implementasi berasal dari kata *to implement* (yang berarti mengimpleentasikan) *to providethe means for carrying out* (yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (yang brarti adanya dampak/akibat yang ditimbulkan terhadap sesuatu aktivitas).

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang

mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- 2) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata oleh instansi Pemerintahan, baik daerah maupun Provinsi.
- 3) Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- 4) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pengetahuan yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan yang kegiatannya tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.2. Teori Implementasi Model Matland

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi model Matland. Teori Matland dipilih karena unsur-unsur yang terdapat dalam teori ini sesuai dengan penelitian penulis. Menurut Agostiono (2010:156), teori implementasi model Matland menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Ketepatan Kebijakan/ Ketepatan sebuah kebijakan dapat ini dinilai dari:
 - a) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
 - b) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- 2) Ketepatan Pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan tidaklah hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk memaksimalkan ketepatan pelaksanaan sebuah aktivitas atau kegiatan, ada tiga unsur dapat bisa menjadi pelaksana selain Pemerintah, yakni kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
- 3) Ketepatan Target. Untuk mencapai ketepatan sebuah target dari pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan beberapa unsur, yakni :
 - a) Perencanaan target yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang peraturan yang telah dibuat, tidak ada tumpang tindih dengan aktivitas lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
 - b) Target yang menjadi sasaran pelaksanaan dalam kondisi siap untuk diintervensi atukah tidak. Adanya bentuk kesiapan target yang menjadi sasaran bukan secara alami (kondisi lingkungan) saja, namun juga dilihat apakah kondisi target (personal) dalam keadaan baik atau tidak.

c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4) Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

- a) Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait.
- b) Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam

2.1.3. Pengertian kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang ditulis dan ditetapkan dan merupakan keputusan formal organisasi atau instansi Pemerintahan yang bersifat mengikat serta mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan tertulis yang diatur oleh Pemerintahan, menjadi dasar utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.

Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif Adapun contoh-contoh kebijakan adalah:

- 1) Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Keppres
- 4) Kepmen
- 5) Peraturan Kementerian
- 6) Keputusan Bupati
- 7) Keputusan Direktur

Friedrich menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, (2007:173).

Anderson (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif. kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, (Abidin, 2006:22).

Dye mengemukakan kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan

apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan, (2005:17).

Kebijakan juga berarti seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, (Lubis, 2007: 05). Kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, Tachjan (2006: 19). Kemudian, kebijakan juga dapat berarti suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan satu sama lain yang disusun oleh instansi atau pejabat Pemerintah dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan pembangunan perkotaan, (Dunn, 2010:20).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Solly (2007:89), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sedangkan Budiardjo juga menegaskan bahwa kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, (2000: 12).

Menurut Imron (2002 : 12) kebijakan adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya

alasan yang dapat di terima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau kepada masyarakatnya.

2.1.4. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah program-program yang diatur dan diterapkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Provinsi serta Dinas-Dinas terkait yang dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang seperti Pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, yang dikeluarkan secara tertulis. Budiardjo mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu, (Budiardjo, 2000: 12).

Menurut pendapat Solly (2007:09), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Frederich (yang dikutip dalam Solly, 2007:09) mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah untuk suatu lingkungan tertentu sehubungan dan diterbitkans secara tertulis.

Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan,

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain, (Dunn, 2005: 27). Tachjan mengatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterkaitan akan kepentingan rakyat banyak dan keterkaitan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada, (2006:15).

Abidin (2012: 07) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sedangkan Subarsono (2005:17), bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

2.1.5.. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis, (Tachjan, 2006:24). Tangkilisan Menyatakan Implementasi Kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standart peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, (Winarno, 2014: 151).

Pengertian Implementasi menurut Winarno (2002:102) yang berarti Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas kegiatan yang pada pelaksanaannya memiliki tingkat kesulitan, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan. Winarno juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan serta menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam jangka panjang serta untuk melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Proses aktivitas kegiatan dari sebuah implementasi kebijakan, terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi

kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat bahwa implementasi merupakan suatu proses aktivitas kegiatan yang sifatnya dinamis, dimana dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan instansi terkait, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.1.6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan, Tachjan (2006:25). Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, (2010:102).

Pendapat lain dikemukakan oleh Mustopadjaja (2002:118), yang mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan yang dilakukan mencakup usaha-usaha dan kegiatan untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Serta implementasi pada sisi lain, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak.

Sementara Dwijowijoto (2001: 154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang dilakukan yaitu: 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program. 2) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif dari perumusan kebijakan sampai

evaluasi kebijakan, kemudian diberlakukan dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan.

2.2. Peraturan Kementerian

Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri, (Hasan, 2007:76).

Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah “Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensil pertama (1945), (Hadjon, 2002:90).

Menurut *wikipedia*, Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang serta Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

2.3. Fakir Miskin

2.3.1. Pengertian Fakir Miskin

Secara umum fakir miskin dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan seseorang (individu) atau keadaan tidak mampu seseorang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Melihat pandangan fakir secara umum, tentu hampir serupa dengan kata miskin yang juga dimaknai dengan orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Sehingga dia dihina karena kemiskinannya, (Hasby (2006:166)).

Mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menganggap bahwa pengertian fakir itu berbeda dengan pengertian miskin, ada pula yang menganggap dua istilah itu memiliki pengertian yang sama yaitu sama-sama orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang harta atau orang yang pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika orang menyebut istilah fakir berarti meliputi juga pengertian miskin, demikian ketika menyebut kata miskin berarti meliputi fakir.

Pendapat yang membedakan pengertian fakir dan miskin mengatakan: fakir, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

2.3.2. Faktor-Faktor Penyebab Kefakiran

Menurut Noor (2009:288), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya Kefakiran/kemiskinan didalam diri seseorang, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan yang terlampau rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan jenjang pendidikan yang diperoleh tidak dapat selesai sampai akhir. Kemudian keterbatasan ini membuat kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja juga terbatas. Atas dasar kenyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Malas bekerja

Sikap malas yang ada dalam diri seseorang merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas tersebut membuat seseorang individu bersikap acuh tak acuh dalam menyikapi suatu yang pada hasilnya untuk kegiatan bekerja menjadi malas untuk dilakukan, atau bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada

keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.

3. Keterbatasan sumber alam

Kefakiran/kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya alamiah miskin. Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya: tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya.

4. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Untuk masyarakat kurang mampu, tersedianya lapangan kerja merupakan faktor yang sangat mendukung dalam mendapatkan pekerjaan. Semakin sedikit lapangan kerja disediakan, maka semakin sulit masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan. Lapangan kerja yang biasanya diperkerjakan untuk masyarakat kurang mampu adalah buruh pabrik, kuli bangunan, asisten rumah tangga dan sejenisnya.

5. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal untuk para masyarakat kurang mampu merupakan hal yang paling penting dalam bekerja. Untuk memulai sebuah usaha, baik usaha besar atau kecil tetap membutuhkan modal usaha. Untuk memulai sebuah pekerjaan juga membutuhkan modal, seperti modal untuk

membuka usaha kecil-kecilan, modal untuk akomodasi dalam bekerja dan sebagainya.

6. Beban keluarga

Semakin banyak anggota didalam sebuah keluarga, maka akan semakin banyak meningkat pula tuntutan/beban hidup yang harus dipenuhi. Mulai dari kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya hidup dan lainnya. Kepala rumah tangga yang mempunyai anggota keluarga banyak (anak lebih dari 2), apabila tidak diimbangi dengan pekerjaan yang layak serta usaha-usaha dalam meningkatkan pendapatan, sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang diimbangi dengan penambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat *latent* (tersembunyi).

2.3.3. Ciri-Ciri Fakir Miskin

Kemudian, Noor (2009:289), juga menjelaskan bahwa ciri-ciri seorang fakir miskin, yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh tiga hal, yakni sebagai berikut:

- 1) Pandangan masyarakat terhadap kebutuhan pokok terutama kebutuhan pokok rumah tangga.
- 2) Status masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal
- 3) Kebutuhan pribadi masyarakat sesuai dengan gaya hidup.

Persepsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, gaya hidup, status sosial dan sistem nilai yang dimiliki. Dalam beberapa unsur tersebut, tingkat kemiskinan diukur oleh

masyarakat unsur-unsur tersebut. Tingkat status masyarakat dalam lingkungan sosial, bukan di ukur berdasarkan kebutuhan pokok, melainkan bagaimana tingkat pendapatan seseorang tersebut ditengah-tengah lingkungan masyarakat sekitarnya. Sebenarnya, kebutuhan pokok masyarakat untuk dapat hidup secara manusiawi ditentukan oleh keadaan sandang pangan yang dimakan apakah bernilai gizi cukup dengan nilai protein dan kalori cukup sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim, lingkungan keadaan rumah, pendidikan dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Kesemuanya dapat tersimpul dalam barang dan jasa serta tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi penetapan pendapatan minimal yang diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimal. Menurut Sayogya, garis kemiskinan dinyatakan dalam Rp/tahun, ekuivalen dengan nilai tukar beras.

Menurut Soelaeman (yang dikutip oleh Noor, 2009:290), atas dasar ukuran yang telah disebutkan diatas, maka masyarakat yang hidup di bawah garis Kefakiran/kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi atau usaha sendiri seperti tanah, modal, keterampilan dan sejenisnya;
- 2) Tingkat pendidikan yang rendah, seperti tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan;
- 3) Kebanyakan masyarakat tinggal di desa sebagai pekerja bebas (*self employed*), berusaha apa saja dilakukan untuk mendapatkan uang;

- 4) Banyak yang pergi dari desa (merantau) tanpa pekerjaan yang jelas dan juga pendidikan serta keterampilan. Hanya mencoba peruntungan di kota besar saja.

2.3.4. Cara Mengatasi Kefakiran

Menurut Rusli (2005:11), banyak cara yang bisa dilakukan guna mengatasi masalah ke fakiran/kemiskinan, di antara cara pemecahan masalah Kefakiran/kemiskinan yang paling urgen adalah:

- a) Latihan pendidikan keterampilan

Dengan adanya latihan keterampilan ini diharapkan seseorang/anggota masyarakat mempunyai bekal kemampuan untuk terjun dalam dunia kerja. Upaya peningkatan keterampilan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu dengan dibentuknya Balai Latihan Keterampilan. Di bidang pendidikan ini diupayakan menghasilkan lulusan yang siap pakai/terjun ke lapangan kerja. Oleh sebab itu sekolah kejuruan hendaknya dibangun secara besar-besaran.

- b) Berwiraswasta

Modal kemampuan yang berupa keterampilan akan menunjang atau memberi bekal bagi seseorang untuk memperoleh pendapatan yang dapat diterapkan melalui dunia wiraswasta. Karena bagaimanapun juga tidak semua orang, bisa menjadi pegawai negeri, meskipun telah menyelesaikan studinya di suatu pendidikan formal. Jiwa wiraswasta perlu ditanamkan sejak anak-anak sehingga kemampuan berusaha ada pada setiap anak atau orang. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana Pemasyarakatan

program ini sangat diperlukan terutama dalam kaitannya dengan pengendalian jumlah penduduk yang terlampau cepat. Pertumbuhan di bidang ekonomi dapat mempunyai arti kalau dibarengi dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

2.4. Dinas Sosial

2.4.1. Pengertian Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.6.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial;
- b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Sosial;
- c) Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- e) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Sosial;
- f) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g) Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penerapan kebijakan di bidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d) Penyiapan bahan penetapan kebijakan tentang komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
- e) Penyiapan bahan kerjasama pemerintah dan kerjasama non pemerintah dalam penanganan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
- f) Penyiapan bahan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pemberdayaan dan pengembangan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
- g) Penyiapan bahan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi pemberdayaan dan pengembangan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan dan pengembangan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
- i) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- j) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses riset penelitiannya dengan menggunakan pendekatan *naturalistic*. Pendapat para ahli yakni Winarta (dalam Moleong, 2006:26), mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan *naturalistic* untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

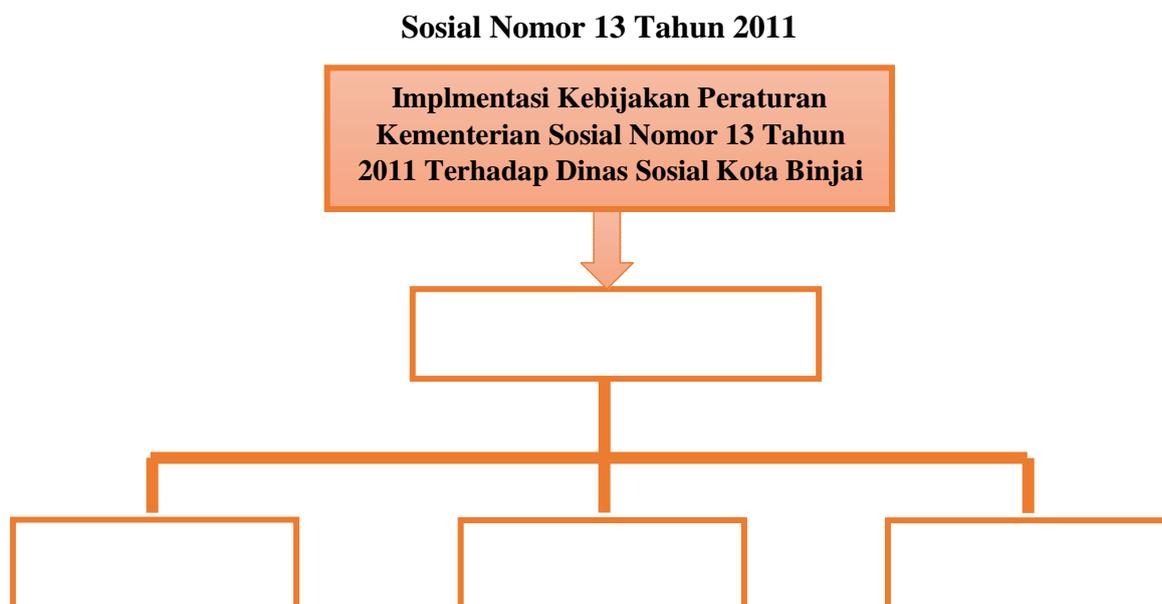
Moleong (2006:04), juga mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah sebuah metode yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud penafsiran fenomena sosial yang terjadi dengan nyata dan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Pada penelitian ini, penulis mengadakan pendekatan yang diarahkan pada latar belakang dari individu secara keseluruhan dengan menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang kompleks mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Binjai.

3.2. Kerangka Konsep

Nawawi (2005:43) mengatakan bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai pemikiran tertulis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Berdasarkan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori maka konsep dapat digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis sebagai berikut:

Gambar 3.1.

Bagan Kerangka Konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian



Sumber Hasil Data 2019

3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variable agar lebih

terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat di temukan oleh orang lain kebenarannya. Adapun definisi konsep dari kerangka konsep di atas adalah sebagai berikut : (Nawawi, 2005:43).

- 1) Pengertian Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang di inginkan.
- 2) Pengertian kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.
- 3) Pengertian implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standart peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.
- 4) Fakir miskin adalah ke tidak mampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ke tidak mampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha.
- 5) Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu hubungan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut. Mengambil dari sebuah defenisi implementasi maka penulis akan membuat sebuah akan membuat sebuah kategorisasi, kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Kategorisasi Penelitian

Konsep Teoritis	Kategorisasi Penelitian
Adanya Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program kerja • Penyediaan anggaran dana • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
Adanya Pelayanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan • Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi • Pelayanan akses dan kebutuhan
Adanya Bantuan Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Program rehabilitasi anak jalanan dan lansia • Program bantuan dana untuk pengembangan usaha • Program pendidikan untuk anak-anak
Adanya Target	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program sesuai dengan tujuan • Hasil kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab • Kendala/hambatan dalam pencapaian program kerja

Sumber Hasil Data 2019

3.5. Narasumber Penelitian

Narasumber ialah peranan dari seorang informan yang memberikan informasi serta dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup. Dalam penelitian ini, narasumber dari penulis adalah :

- 1) Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai, Bapak Triono Julimawardi, S.Sos.
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Ibu Suzannah Budiarti
- 3) Fakir miskin di Kota Binjai, Bapak Suherwin dan Ibu Asiah Lubis.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis, penulis menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yakni data primer dan data sekunder. Menurut Hariwijaya dan Triton (2005:58), Data primer adalah data yang akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Sedangkan data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Observasi merupakan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat dengan masalah yang dihadapi.
- b) Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari dilakukan wawancara dengan narasumber penelitian adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara

dilakukan oleh penulis dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan yang sudah disusun berdasarkan pedoman wawancara dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara juga terkadang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini dikarenakan dalam melakukan wawancara, penulis boleh melakukan pengembangan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang dilontarkan oleh narasumber, tidak terpaku pada pedoman wawancara penelitian.

Kemudian, teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Dokumentasi merupakan data-data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk foto hasil penelitian dan data-data pendukung lokasi penelitian, seperti visi dan misi, struktur organisasi dan lainnya.
- b) Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku tulisan yang mempunyai relevansi langsung dari masalah yang akan diteliti, internet, dan jurnal penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Bodgan dan Bliken (dalam bukunya Moelong, 2006:248) mengatakan jika analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan menurut Moelong (2006:239), mengemukakan bahwa teknik analisis data merupakan proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis, kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

Untuk menganalisis penelitian ini, digunakan model kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat dan berbentuk tidak berbentuk angka untuk mempermudah analisis selanjutnya. Kemudian Miles & Huberman (dikutip dalam Sugiyono, 2010:338) yang menyatakan bahwa teknik analisis data, terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data seperti penyederhanaan, dan transformasi data-data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah menyerhanakan hasil penelitian kemudian menyatukan hasil penelitian dengan observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan.

- 2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, dimana setelah mereduksi data, menyajikan data, melakukan pembahasan dan terakhir menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.8.1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Binjai yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan No.113, Pahlawan, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara 20743. Alasan penulis memilih Dinas Sosial Kota Binjai karena penulis masih melihat gelandangan dan pengemis di persimpangan dan jalanan Kota Binjai.

3.8.2. Waktu Penelitian

Pertama-tama, penulis mendapati surat izin penelitian dari Biro Fakultas Fisip Umsu pada tanggal 1 Agustus 2019, dan menyerahkan surat tersebut kepada Dinas Sosial Kota Binjai. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Binjai. Riset penelitian (wawancara dengan narasumber penelitian) dilakukan selama empat hari berturut-turut, mulai dari tanggal 9-14 Agustus 2019. Hal ini dikarenakan, waktu selama penelitian dilakukan terbatas oleh pihak Dinas Sosial Kota Binjai. Mulai dari jam 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB saja.

3.8.3. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Kementerian Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang sosial dan ketenagakerjaan di kota medan sesuai dengan Peraturan Kementerian Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan. Sebagai tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang sosial dan tenaga kerja dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentralisasi, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial dan urusan ketenagakerjaan di kota Medan.

Visi & Misi Dinas Sosial Kota Binjai

Visi :

“Terwujudnya Kota cerdas yang layak huni, Berdaya Saling dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera”.

Misi :

- a. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan.

- b. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PKMS.
- c. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjadi keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PKMS.

Sasaran Dinas Sosial Kota Binjai

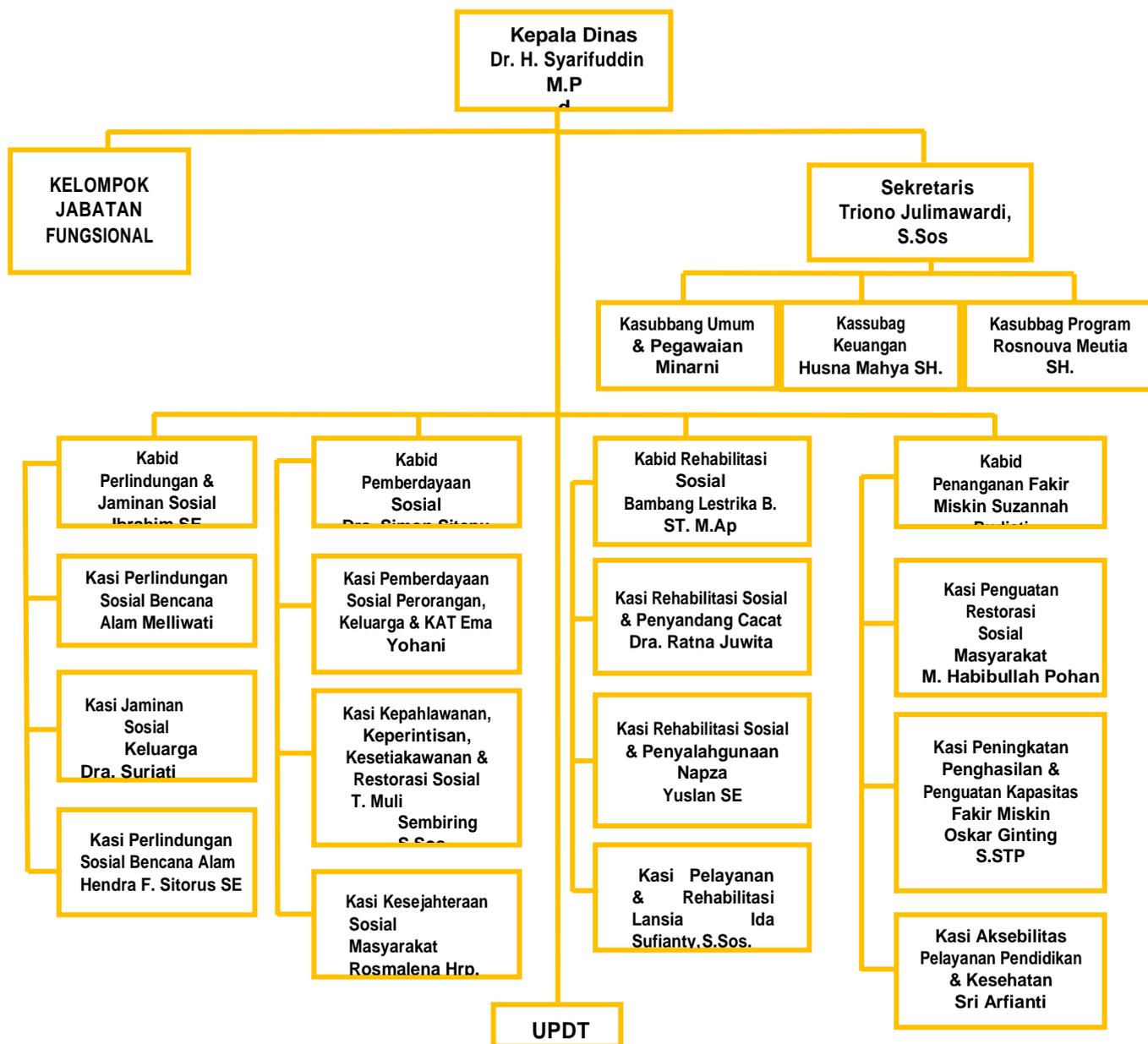
Sasaran kerja Dinas Sosial Kota Binjai, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemudahan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, pemberdayaan dan jaminan kesejahteraan sosial PKMS.
2. Para penyelenggara program pelayanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan bekerja secara lebih optimal.
3. Bertambahnya program-program perlindungan dan jaminan sosial bagi PKMS.
4. Masyarakat pelaku sejarah, pejuang, tokoh masyarakat, etnis, agama dan tokoh pendidikan bersama-sama secara melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

3.8.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Binjai

Tabel 3.2.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Binjai



Sumber Hasil Data Penelitian 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Identitas Narasumber Dan Proses Wawancara

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *naturalistic*, yang mana penelitian dilakukan dan cacatan hasil wawancara bersifat natural, dimana tidak ada rekayasa dari penulis maupun subjek penelitian, yakni Dinas Sosial Kota Binjai dan akan menjabarkan jadwal wawancara dengan keempat narasumber dalam tabel, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Jadwal Wawancara Penulis Dengan Narasumber

No.	Nama Narasumber	Tanggal/Waktu Penelitian	Keterangan
1	Bapak Trioni Julimawardi, S.Sos. (Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai)	Penelitian dilakukan pada Senin, 9 Agustus 2019 pada pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai	Sesi wawancara dilakukan di ruangan atau Kantor Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai.
2	Ibu Suzannah Budiati (Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin) di Dinas Sosial Kota Binjai	Penelitian dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2019 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.	Sesi wawancara dilakukan di ruangan/Kantor Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Binjai

3	Bapak Suherwin (Penerima Bantuan Sosial) dari Dinas Sosial Kota Binjai	Penelitian dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2019 pada pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai	Sesi wawancara dilakukan di tempat kerja narasumber di tempel ban pinggir jalan.
4	Ibu Asiah Lubis (Penerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Binjai)	Penelitian dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2019 pada pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai	Sesi wawancara dilakukan di rumah Ibu Asiah.

Sumber Hasil Data Penelitian 2019

Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019, penulis kembali lagi ke Dinas Sosial Kota Binjai untuk mengambil surat balasan riset yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Binjai serta mengambil data-data lain dari Dinas Sosial Kota Binjai yang berupa, Visi dan Misi serta struktur Organisasi dari Dinas Sosial Kota Binjai sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan riset penelitian terkait dengan judul skripsi penulis.

4.2. Implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial nomor 13 tahun 2011

4.2.1. Adanya Perencanaan

Menurut Bapak Triono, program kegiatan yang Dinas Sosial Kota Binjai dijalankan sesuai dengan visi dan misinya, yakni penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan pada masyarakat Kota Binjai. Kemudian Bapak Triono juga menjelaskan jika yang membuat visi dan misi serta program kegiatan adalah

Pemerintahan Daerah beserta jajarannya yang sesuai dengan Peraturan Kementerian terkait penanggulangan kemiskinan.

“Program yang dijalankan sudah pasti sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Seperti pelayanan, perlindungan, jaminan pemberdayaan, rehabilitasi dan lainnya banyaklah untuk menanggulangi kemiskinan”.

Untuk penyusunan anggaran dana kepada penanggulangan masyarakat miskin, Bapak Triono menjabarkan dana diturunkan secara berkala sesuai dengan program yang sedang dijalankan. Seperti ketika ada program bantuan anak sekolah, maka dana akan dikeluarkan untuk kebutuhan sarana dan prasana penunjang program.

“Jadi kalau anggaran dana itu, biasanya kita keluarkan secara berkala. Tidak asal-asalan. Tidak..tidak begitu. Tapi lebih kepada program yang kita jalankan. Semisal, program bantuan dana sekolah untuk anak-anak kurang mampu, nah kita susun anggaran dananya. Kurang lebih seperti itu”.

Agar pelaksanaan program berjalan dengan baik, Bapak Triono juga menjelaskan bahwa sarana dan prasana penunjang disediakan sesuai dengan kebutuhan. Apa saja yang dibutuhkan ketika program dijalankan, maka Dinas Sosial Kota Binjai akan menyediakan sarana dan prasana pendukung. Sarana dan prasarana yang biasanya disediakan dapat berupa obat-obatan untuk penanggulangan masyarakat yang sedang sakit, seperti alat-alat sekolah ketika melakukan program pemberdayaan bantuan untuk anak-anak sekolah dan lainnya.

“Kalau untuk sarana dan prasarana yang digunakan itu sudah pasti tergantung pada program apa yang kami jalankan. Semisal, ketika program rehabilitasi, maka kami akan sediakan obat-obatan dan dokter, atau ketika pada program pemberdayaan untuk anak-anak, kami akan sediakan misalnya buku sekolah, seragam sekolah atau bantuan dana untuk

membayar uang sekolah anak-anak. Melihat kondisi masyarakat jugalah, kurang lebih seperti itu”.

Menurut Ibu Suzannah, program yang sudah disusun oleh Dinas Sosial Kota Binjai adalah program pemberdayaan anak-anak rehabilitasi untuk anak-anak, pelayanan bantuan kesehatan serta pemberdayaan modal usaha untuk para keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Beliau juga menjelaskan jika yang mengatur program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai adalah Kepala Dinas, Pemerintahan Daerah serta jajaran yang terkait sesuai dengan Peraturan Kementerian dan Undang-Undang yang telah ada.

“Untuk program yang telah dicanangkan oleh Dinas Sosial Kota Binjai itu adalah proram pemberdayaan anak-anak dan rehabilitasi yaa, kemudian pelayanan kesehatan untuk para fakir miskin dan bantuan modal usaha untuk para keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan”.

Kemudian Ibu Suzannah juga menjelaskan tentang anggaran dana yang di lokasikan untuk program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Dana anggaran tersebut berasal dari Pemerintahan yang dialokasikan untuk Dinas Sosial Kota Binjai. Kemudian Dinas Sosial Kota Binjai membagi dana anggaran tersebut untuk program-program yang akan direalisasikan. Ibu Suzannah juga mengatakan jika sarana dan prasana tambahan sebagai pendukung program juga akan disediakan sesuai dengan kebutuhan. Sarana dan prasana tersebut dapat berupa persiapan-persiapan untuk pelaksanaan program dan sejenisnya.

“Sarana dan prasarana pendukung sudah pasti ada ya. Dan sarana dan prasarana tersebut dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya jika kita ada program membagikan buku, alat tulis dan seragam sekolah untuk anak-anak yang notabennya keluarga tidak mampu, maka sarana dan prasarana yang kita sediakan adalah produk nya dan akodomasi untuk membawa produk tersebut”.

Menurut Bapak Suherwin, Beliau mengetahui tentang program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Beliau juga menjelaskan bahwa ia pernah mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Binjai.

“Ya saya pernah dapat ya bantuan dari Dinas Sosial Kota Binjai. Saya pernah dapat bantuan pengobatan gratis, terus juga pernah dapat bantuan sembako. Tapi yang paling sering ya bantuan sembako. Ada beras, gula, minyak gitulah”.

Bagi Bapak Suherwin, bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Binjai adalah bantuan yang sangat berharga, dikarenakan dengan adanya bantuan tersebut, dapat membantu segi kehidupan dari Bapak Suherwin.

”Kalo menurut saya ya bantuan kayak gini sangat penting lha Mbak. Apalagi kalo bisa diberikannya terus-terusan kan. Karena saya sudah tua. Tinggal juga sama istri. Anak-anak merantau. Jadi kalo ada bantuan ini, kami yang tua ini tertolong kali”.

Bapak Suherwin dapat digolongkan sebagai seorang lansia berserta dengan istrinya. Untuk itu, Beliau mengharapkan adanya bantuan berkala yang dapat diberikan oleh Dinas Sosial.

Menurut Ibu Asiah, Beliau mengetahui adanya program yang dijalankan Dinas Sosial Kota Binjai dalam penanggulangan fakir miskin. Menurutnya, program yang dilaksanakan sudah banyak yang terealisasi baginya dan bagi masyarakat Kota Binjai.

“Ya saya tahu program yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Setiap tahun ada saja yang diberikan kepada kami. Bantuannya macam-macam sesuai lah sama apa yang kami butuhkan. Saya bersyukur sekali”.

Ibu Asia juga menjelaskan jika program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Binjai sangat menguntungkan bagi dirinya yang seorang orang tua tunggal. Dengan bantuan itu, Beliau dapat menggunakan uang yang ia punya untuk keperluan lain.

“Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Binjai ya sangat membantu saya untuk yang janda ini lah Mbak. Ada sedikit keringanan yang saya dapat gitu”.

4.2.2. Adanya Pelayanan Sosial

Menurut Bapak Triono ketika ditanya mengenai sosialisasi kepada fakir miskin, Beliau mengatakan ketika akan menjalankan sebuah program, maka terlebih dahulu Dinas Sosial Kota Binjai akan melakukan sosialisasi kepada fakir miskin per Kecamatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keributan dan masyarakat yang berlimpah ruah untuk mendapat bantuan.

“Untuk sosialisasi dengan masyarakat dan fakir miskin sudah kita lakukan tentunya sebelumnya. Misalnya kita ingin mengadakan bantuan pemberdayaan berupa bantuan modal kan untuk para fakir miskin, maka kita akan mensosialisasikannya kepada masyarakatnya. Biasanya kita juga bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan di Kota Binjai. Ini supaya tidak terjadi keributan atau keos kan, membludak. Jadi kita data dulu”.

Kemudian, Bapak Triono juga menjabarkan spesifikasi bantuan pada kegiatan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi kepada fakir miskin yang berupa bantuan obat-obatan untuk para penderita ringan, seperti flu, demam, batuk, sesak nafas dan sejenisnya. Seperti obat-obat *generik* (obat-obatan umum). Pelayanan kesehatan lainnya juga dirujuk kepuskesmas yang memperbolehkan para fakir

miskin untuk berobat dan mendapatkan pelayanan yang baik. Dinas Sosial Kota Binjai juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti puskesmas, posyandu, para sukarela (LSM).

Untuk pelayanan masyarakat yang sifatnya yang sifatnya berupa saran dan kritik dari masyarakat itu sendiri atau keluhan para fakir miskin, Bapak Triono juga menjelaskan jika pelayanan dalam bentuk tersebut ada di Dinas Sosial Kota Binjai. Para masyarakat dapat memberitahukan keluhan kesalnya pada tempat kritik dan saran yang telah disediakan. Sampai sejauh ini, upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Binjai dalam meningkatkan pelayanan khususnya dalam kebutuhan masyarakat adalah pelayanan kesehatan gratis untuk para fakir miskin/masyarakat yang kurang mampu serta bantuan pendidikan untuk anak-anak.

“Menurut saya, yang selalu diupayakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat itu adalah pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, seperti untuk sakit demam, flu, batuk yang bukan penyakin seriuslah karena sering terkena penyakit seperti itu kan. Kemudian biaya gratis imunisasi dan obat-obatan untuk anak-anak kan, dan bantuan pendidikan. Itu yang sedang kita upayakan maksimal”.

Ketika ditanya seputar sosialisasi dengan masyarakat (fakir miskin), Ibu Suzannah menjelaskan jika ketika sebuah program akan dilaksanakan, terutama untuk masyarakat fakir miskin, maka sosialisasi akan dilakukan terlebih dahulu. Sosialisasi berupa komunikasi langsung dengan cara melihat ke lokasi atau lingkungan tempat para fakir miskin tinggal. Kemudian sosialisasi lainnya berupa media spanduk yang dipasang di jalan-jalan atau daerah yang akan diberi bantuan sosial.

“Biasanya kan, sebelum melaksanakan program seperti pada program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian modal bantuan, kita mengadakan sosialisasi berupa pendataan dan terjun langsung untuk melihat lokasi dan lingkungan tempat tinggal dari para calon penerima bantuan. Kita juga menggunakan media seperti spanduk yang dipasang di dekat area Kecamatan yang akan kita bantu. Isi dari spanduk tersebut biasanya berupa syarat-syarat penerima bantuan. Agar masyarakat kurang mampu dapat mendaftarkan diri mereka”.

Berbicara tentang pelayanan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Binjai, Ibu Suzannah menjelaskan jika bentuk pelayanan sosial langsung yang diberikan kepada masyarakat atau fakir miskin adalah pelayanan kesehatan. Dinas Sosial bekerjasama dengan puskesmas atau klinik untuk melakukan pelayanan sosial bagi fakir miskin seperti memberikan jasa pengobatan gratis, *check up*, dan sejenisnya. Selain itu, Ibu Suzannah juga menjelaskan bahwa pelayanan sosial juga dapat dalam bentuk keluhan serta kritik dan saran dari para masyarakat sendiri. Para fakir miskin atau masyarakat kurang mampu dapat memasukkan kritik dan saran di kotak saran atau langsung pada bagian Humas dari Dinas Sosial Kota Binjai.

Sampai saat ini menurut Ibu Suzannah, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Binjai dalam meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu/fakir miskin adalah memberikan jasa pengobatan gratis, kebutuhan pokok (sembako) serta pendidikan untuk anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi bangsa yang wajib untuk di prioritaskan.

“Dinas Sosial Kota Binjai sampai saat ini masih berupaya untuk meningkatkan bantuan sosial dalam bidang pelayanan kesehatan seperti memberikan pengobatan secara gratis kepada fakir miskin, kebutuhan pokok (sembako) seperti beras dan bantuan pendidikan untuk anak-anak.

Hal ini karena kesehatan, makanan dan pendidikan adalah hal yang prioritas saya rasa untuk diutamakan”.

Menurut Bapak Suherwin, sampai saat ini yang Beliau ketahui tentang program pelayanan sosial yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai adalah program pelayanan kesehatan, pemberian bantuan pokok ke masyarakat dan bantuan pendidikan untuk anak-anak saja serta bantuan rehabilitasi rumah.

“Yang saya tahu itu bantuan yang sering dikasi oleh Dinas Sosial Kota Binjai ya itu bantuan untuk berobat ya, terus bantuan pokok sama waktu itu sekitar tahun 2017 kalo gak salah, Dinas Sosial Kota Binjai membuatkan rumah rehabilitasi untuk warga kecamatan mana gitu ya yang kena banjir. Sama saya pernah dengar dari tetangga dapat bantuan pendidikan anaknya gitu”.

Berbicara tentang pelayanan kesehatan, Bapak Suherwin menjelaskan jika para pegawai dari Dinas Sosial sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang Beliau sayangkan adalah petugas puskesmas/klinik yang melakukan pelayanan yang kurang baik, dikarenakan mereka dalam model pengobatan gratis.

“Kalo untuk orang Dinasnya ya, baik-baik. Ramah-ramah. Waktu pembagian sembako pun baik. Cuma ya itu, saya waktu ikut pengobatan gratis, saya kena batuk ya, suster di puskesmasnya kurang ramah, kurang baiklah begitu. Mungkin karena kami pake pengobatan gratis”.

Dari adanya kejadian tersebut, besar harapan dari Bapak Suherwin agar pelayanan sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinas Sosial atau bahkan Dinas Sosialnya sendiri agar lebih ramah dan maksimal dalam melakukan pelayanan sosial. Hal ini harusnya berdasar asas menghargai dan hak sesama masyarakat, baik kalangan fakir miskin maupun masyarakat ekonomi berkecukupan.

Menurut Ibu Asiah, bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Binjai dalam program pelayanan sosial adalah pelayanan kesehatan, penyediaan rumah rehabilitasi untuk korban bencana alam, dan bantuan pendidikan untuk anak-anak jalanan atau anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.

“Yang saya tahu bantuan yang dikasi sama orang Dinas Sosial ya itu bantuan kesehatan, bantuan rumah untuk korban bencana gitu saya pernah dengar, terus sama bantuan pendidikan anak-anak. Ada untuk anak jalanan ada juga untuk anak-anak gak mampu gitu”.

Untuk sistem pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Binjai, Ibu Asiah mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan cukup baik, meskipun terkadang ada pegawai yang kurang ramah dalam melakukan pelayanan sosial, namun Ibu Asiah memaklumi hal tersebut.

4.2.3. Adanya Bantuan Pokok

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Triono, prioritas dari Dinas Sosial Kota Binjai dalam menanggulangi kemiskinan adalah melakukan pelayanan kesehatan, pemberdayaan bagi fakir miskin. Untuk program-program yang sudah dijalankan untuk anak jalanan dalam bentuk bantuan pendidikan untuk para anak jalanan serta untuk para lansia adalah bantuan pokok sembako dan bantuan pengobatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bagi keluarga yang tidak mampu atau yang tidak berpenghasilan, Bapak Triono menjelaskan jika Dinas Sosial Kota Binjai akan melakukan pendataan terlebih dahulu untuk mengetahui alasan, sebab dan kondisi keluarga yang tidak mampu tersebut. Kemudian, bantuan yang diberikan biasanya berupa program

pemberdayaan yakni bantuan mendirikan usaha mandiri (modal usaha) jangka menengah untuk para keluarga tersebut.

“Untuk keluarga yang kurang mampu atau yang notabennya semua anggota keluarganya tidak mempunyai pekerjaan, biasanya kita Dinas Sosial melakukan pendataan terlebih dahulu ke Kecamatan, dan melihat kondisi lingkungan dari keluarga tersebut. Kemudian setelah data-data yang diperoleh cocok dan sesuai dengan standar prosedur, maka kita akan mengurus program bantuan yang diberikan untuk mereka. Biasanya bantuan yang diberikan berbentuk uang untuk modal usaha”.

Kemudian, ketika ditanya tentang bentuk kerjasama yang dilakukan dengan pihak sekolah, Bapak Triono juga memberikan penjelasan bahwa tidak ada bentuk kerjasama khusus dengan pihak sekolah dalam menjalankan program bantuan anak-anak. Bentuk bantuan biasanya diserahkan langsung kepada orang tua anak-anak. Jika anak-anak tersebut adalah anak-anak jalanan yang tidak memiliki tempat/rumah, Dinas Sosial Kota Binjai menyediakan rumah singgah untuk anak-anak tersebut.

Ibu Suzannah juga menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas dari Dinas Sosial Kota Binjai adalah jaminan hidup yang layak bagi kalangan atau masyarakat fakir miskin. Prioritas diutamakan untuk anak-anak dan lansia mengingat, usia anak-anak adalah pembentukan sikap dan karakter. Jika anak-anak tidak mendapatkan bantuan khususnya bantuan pendidikan, maka generasi bangsa sudah pasti akan berkurang. Kemudian untuk para lansia diprioritaskan bantuan sosial dikarenakan menurut Ibu Suzannah, para lansia sudah memasuki usia tidak produktif, hal ini dapat dilihat dari rentannya para lansia untuk terkena penyakit dan sudah tidak mampu lagi untuk bekerja produktif. Maka Dinas Sosial

Kota Binjai perlu memberikan pelayanan sosial yang prioritas untuk para lansia tersebut.

Kemudian untuk para keluarga yang tidak mampu, Dinas Sosial Kota Binjai sebelum memberikan bantuan sosial, maka akan melakukan pendataan dan melihat langsung kondisi lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal. Melakukan wawancara dan observasi apa alasan keluarga ini tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya.

“Kita kan selain sosialisasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga ada prioritas-prioritas tertentu. Seperti untuk anak-anak jalanan, atau anak-anak yang tidak dapat bersekolah dan para lansia. Tapi kita juga memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu dengan melakukan pendataan terlebih dahulu, seperti melihat kondisi rumahnya, lingkungan, serta alasan mengapa keluarga tersebut tidak mendapatkan pekerjaan atau mempunyai penghasilan”.

Ibu Suzannah juga menjelaskan jika untuk program bantuan untuk anak-anak, Dinas Sosial Kota Binjai tidak melakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Dinas Sosial Kota Binjai lebih bersifat pribadi memberikan bantuan melalui orang tuanya atau menyediakan bantuan langsung untuk anak-anak jalanan tersebut.

Bapak Suherwin pun menjelaskan, bantuan sosial yang sudah Beliau dapatkan dari Dinas Sosial Kota Binjai adalah bantuan sembako dan bantuan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas. Selain itu, Bapak Suherwin menjelaskan bahwa Beliau tidak mendapatkan bantuan apapun. Tetapi, berdasarkan komunikasi dengan para tetangga, ada juga yang mendapat bantuan dalam aspek yang berbeda.

“Yang kayak saya bilang tadi, bantuan yang saya dapat itu ya sembako sama pengobatan di puskesmas waktu saya dan istri saya sakit. Itu aja.

Kalo bantuan yang lain saya belum ada dapat. Tapi kata tetangga saya mereka dapat bantuannya lain dari saya”.

Ibu Asiah menjelaskan bahwa bantuan sosial yang sudah didapat oleh Beliau dari Dinas Sosial Kota Binjai adalah bantuan biaya pendidikan sekolah untuk anak. Beliau mengutarakan bahwa sebelum mendapat bantuan tersebut, ia diminta untuk melengkapi data-data di Kecamatan. Data tersebut seperti KPT, KK dan Surat keterangan kelahiran anak.

“Bantuan yang sudah saya dapat dari orang Dinas ya itu bantuan pendidikan untuk anak-anak. Saya pernah dapat bantuan buku, seragam sekolah pokoknya kebutuhan sekolah lah. Terus pernah juga dapat uang tunai untuk bayar uang sekolah anak. Sangat terbantu sekali saya. Jadi uang yang saya dapat bisa untuk keperluan lain gitu Mbak”.

Ibu Asiah juga sangat bersyukur mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Binjai. Harapannya Beliau ingin bantuan ini diberikan secara berkala untuknya, karena demi anak-anaknya mendapat pendidikan dan tidak putus sekolah.

4.2.4. Adanya Target

Bapak Triono mengatakan jika target utama dari Dinas Sosial Kota Binjai dalam penanggulangan kemiskinan adalah menjamin masyarakat Kota Binjai agar tidak hidup dalam keadaan miskin. Serta menjamin kehidupan anak-anak dan lansia dengan baik. Sampai saat ini, target yang sudah tercapai sekitar 80%.

“Target utama dari Dinas Sosial Kota Binjai sudah tentu untuk memberantas kemiskinan dan menjamin masyarakat Kota Binjai dalam penanggulangan kemiskinan. Dan menurut saya program-program yang sudah berjalan 80%. Sisanya belum berjalan karena ada hal-hal kecil yang belum dapat terlaksana dengan baik”.

Ketika ditanya seputar efektivitas para pegawai dalam melaksanakan program kerja, Bapak Triono menjelaskan jika sampai saat ini para pegawai sudah

berusaha maksimal dalam melakukan dan melaksanakan program kerja. Namun tidak dipungkiri jika ada hambatan-hambatan kecil dalam proses pelaksanaan kerja. Beliau mengatakan jika kelebihan para pegawai dalam melaksanakan program kerja adalah, setiap program kerja yang dicanangkan dapat teratasi dengan baik sampai pada proses akhir kerja. Sedangkan kekurangan para pegawai dalam bekerja adalah, sebagian kecil dari para pegawai tidak efektif/maksimal dalam melakukan proses kerja. Namun Beliau menegaskan hal ini dapat tertutupi dengan baik karena banyak pegawai dengan tingkat efektivitas kerja yang tinggi.

“Menurut saya yang menghambat program kerja itu seperti faktor-faktor eksternal tentunya seperti pendataan yang tidak sesuai dengan pegawai yang kurang efektif dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaannya”.

Untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi, Bapak Triono menjelaskan jika yang dilakukan Dinas Sosial Kota Binjai adalah melakukan pendataan secara ulang kepada para fakir miskin dan melakukan evaluasi kerja kepada para pegawai agar lebih efektif dalam melakukan dan melaksanakan program kerja yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada para fakir miskin.

Ibu Suzannah menjelaskan bahwa target utama dari Dinas Sosial Kota Binjai adalah mensejahterakan kehidupan fakir miskin mulai dari pelayanan sosial, pendidikan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Sampai saat ini, Ibu Suzannah menjelaskan jika target pencapaian tersebut sudah berjalan sekitar 80-90%.

“Target utama kita sudah jelas ya, untuk mensejahterakan fakir miskin dari berbagai aspek ya, seperti pendidikan, rehabilitasi untuk anak-anak yang bermasalah dan memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang

dayaguna. Dan proses pelaksanaan dari target kita ini sudah berjalan 80-90%. Hal ini tidak bisa sampai 100% karena sudah pasti ya setiap melaksanakan kegiatan sudah pasti mempunyai kendala dan hambatan”.

Ibu Suzannah pun memberikan penjelasan bahwa setiap pegawai yang membantu melaksanakan program kegiatan sudah berusaha dengan baik dan maksimal. Namun tentunya dalam proses penyelenggaraan tidak dapat berjalan dengan sempurna. Adapun hambatan/kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program adalah cakupan atau pelayanan kesejahteraan yang masih sangat terbatas baik dari segi pelayanan maupun dana anggaran yang dikelola dan dikeluarkan. Kemudian, kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan sosial masih terbatas serta koordinasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas.

Menurut Bapak Suherwin, Beliau tidak pernah mendapat sosialisasi langsung. Beliau mendapat bantuan sosial yang Beliau jelaskan berdasarkan keterangan oleh pihak Kecamatan. Untuk ikut sosialisasi atau Dinas Sosial datang ke rumah untuk melakukan sosialisasi, Beliau menegaskan tidak ada.

“Saya gak pernah itu ikut-ikutan yang begituan. Waktu itu saya dapat bantuan dari Camat. Orang Camat datang kerumah untuk ngedata. Terus yasudah saya dapat bantuannya”.

Bapak Suherwin juga mengatakan jika berdasarkan hambatan yang ditemukan untuk pihak Dinas Sosial Kota Binjai, Ia tidak mengetahuinya. Namun untuk dirinya sendiri adalah hambatan yang dialami adalah susahnya mendapat informasi terkait bantuan sosial jika tidak mendapat informasi dari para tetangga atau pegawai Kecamatan.

“Ya kalo untuk orang Dinasnya saya gak paham apa kendala merekalah. Tapi kalo untuk saya pribadi, susahnya itu saya sudah susah baca, rabun jadi kalo tidak dapat informasi dari tetangga atau orang camat yang tidak dapat info saya”.

Berbicara mengenai target pencapaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Binjai, Menurut Ibu Asiah, Beliau tidak mengetahui sejauh mana target yang telah ditetapkan. Namun harapan Beliau, target kerja tersebut dapat selalu diberikan secara berkala oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Kemudian Beliau juga menjelaskan bahwa hambatan yang ditemukan dalam menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial adalah lamanya proses pengumpulan data yang dilakukan. Sehingga ada rasa khawatir dalam dirinya apakah Ibu Asiah menerima bantuan tersebut.

“Kalo ditanya masalah target, saya gak ngerti mbak. Tapi saya harap apapun target dari mereka biarlah, asal bantuan yang saya dapat ada aja tiap tahunnya. Kan lumayan kali untuk bantu tambah-tambah uang sekolah anak, biaya kebutuhan anak gitu”.

4.3. Pembahasan

Setelah menjabarkan hasil riset penelitian berupa wawancara dengan keempat (4) narasumber penelitian yang terdiri dari Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai dan dua (2) orang masyarakat Kota Binjai yang telah menerima bantuan sosial, maka penulis akan melakukan pembahasan dari hasil penelitian tersebut dengan judul skripsi penulis yakni : “Implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Binjai”. Kemudian, pembahasan tersebut merujuk pada tujuan penelitian penulis yang menjelaskan untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai.

Dinas sosial Kota Binjai merupakan sebuah unsur pelaksana Pemerintahan yang bersifat legal serta terkait dengan pelayanan sosial kepada kalangan masyarakat, dibawah Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui layanan-layanan sosial yang diberikan. Layanan-layanan sosial tersebut dapat berupa pelayanan dalam aspek rehabilitasi, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan anak-anak jalanan atau anak-anak dari keluarga yang tidak berkecukupan, kebutuhan pokok masyarakat maupun jaminan pendidikan anak-anak.

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 tahun 2011 tentang penanggulangan fakir miskin, secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus

mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, Dinas Sosial Kota Binjai telah melaksanakan implementasi Peraturan Kementerian nomor 13 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Program-Program yang sudah terlaksana tersebut antara lain pelayanan sosial kesehatan dengan memberikan layanan kesehatan gratis serta obat-obatan *generik* secara gratis di puskesmas Kota Binjai, layanan gratis imunisasi untuk anak-anak, bantuan pokok seperti sembako kepada fakir miskin dan lansia, penyediaan rumah rehabilitasi untuk korban bencana alam serta pemberdayaan anak dalam bentuk bantuan pendidikan (baik sarana dan prasarana maupun dana uang sekolah).

Dinas sosial Kota Binjai juga melakukan sosialisasi dan pendataan sebelum melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditujukan agar para fakir miskin dapat menyerahkan data-datanya untuk diproses. Biasanya penggunaan data seperti ini dilakukan untuk bantuan sosial yang sifatnya seperti bantuan pendidikan untuk anak-anak dan pemberdayaan masyarakat. Cakupan pemberdayaan masyarakat meliputi pengasahan dan binaan *skill*/keterampilan, seperti contoh bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan atau pengemis perempuan yang sehat jasmani dan rohani akan dibina untuk melakukan keterampilan yang menghasilkan uang. Seperti menenun atau menjahit kain songket melayu khas Kota Binjai dan sejenisnya.

Pemberdayaan masyarakat ini juga dapat dilihat melalui bantuan dana modal usaha untuk para keluarga yang tidak mampu. Modal usaha yang diberikan dalam bentuk dana dan produk barang. Modal usaha yang diberikan juga dalam bentuk usaha rumahan yang dapat menghasilkan uang sehari-hari untuk kebutuhan pangan masyarakat Kota Binjai. Pendataan untuk pemberdayaan modal usaha diberikan tidak pada semua fakir miskin. Melalui pendataan intensif, dan dengan hasil data yang benar-benar keluarga tidak mampu tersebut mendapat bantuan modal usaha untuk kelangsungan hidupnya. Biasanya yang paling sering mendapat bantuan modal usaha seperti ini adalah wanita yang telah bercerai (baik cerai hidup maupun meninggal) dan tidak mempunyai pekerjaan serta lansia yang sudah tidak mampu untuk bekerja produktif.

Tidak dipungkiri dalam menjalankan aktifitas kegiatan, terutama pelayanan sosial, tentunya mempunyai hambatan dan kendala yang tidak terduga. Hambatan tersebut bisa didapat dari internal Dinas Sosial Kota Binjai maupun eksternal. Hambatan internal terjadi dari dalam Dinas Sosial Kota Binjai itu sendiri, seperti kinerja para pegawai yang belum maksimal dalam melakukan jasa pelayanan sosial bagi fakir miskin. Kemudian pendataan yang dilakukan oleh staff pegawai untuk fakir miskin kerap kali tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Sementara hambatan eksternal terjadi diluar Dinas Sosial Kota Binjai. Seperti ketika melakukan pembagian bantuan sosial berupa sembako, kerap kali jumlah yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah yang ada di lokasi tempat pembagian.

Namun, hambatan-hambatan tersebut menurut Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai, Bapak Triono yang menegaskan bahwa hambatan-hambatan ini dapat

di atasi dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Untuk hambatan internal, upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kerja guna mengetahui sejauh mana kinerja para pegawai dalam melakukan pelayanan sosial bagi fakir miskin. Pendataan juga dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kesalahan. Untuk hambatan eksternal, Dinas Sosial Kota Binjai mengadakan sistem pembagian dengan datang langsung kerumah-rumah atau ke perkecamatan Kota Binjai agar bantuan sosial yang sifatnya membagikan dapat terbagi dengan rata dan sesuai dengan para fakir miskin.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan empat (4) narasumber penelitian yang terdiri dari Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai, Kepala Bidang Penanggulangan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Binjai serta dua (2) fakir miskin yang mendapat bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Binjai, maka penulis menarik kesimpulan pembahasan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Kementerian Sosial nomor 13 tahun 2016 tentang fakir miskin di Dinas Sosial Kota Binjai efektif dan berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian nomor 13 tahun 2016 serta sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial Kota Binjai. Tingkat pencapaian target pelaksanaan program sudah mencapai 80%-90%.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Adanya perencanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Binjai terkait penanggulangan fakir miskin berupa pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pembagian bahan makanan pokok (sembako) kepada para lansia atau keluarga tidak mampu, pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan keterampilan dan bantuan usaha modal rumahan, rehabilitasi korban bencana dan rumah singgah untuk anak-anak jalanan serta bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak jalanan.
- 2 Bentuk pelayanan sosial yang diberikan berupa memberikan jaminan berobat gratis untuk para anak-anak dan lansia di puskesmas dan posyandu serta layanan sosial masyarakat untuk memberikan kritik dan saran di kantor Dinas Sosial Kota Binjai dan pengaduan lainnya.
- 3 Bantuan pokok yang terus diberikan secara berkala adalah bantuan bahan makanan pokok untuk para lansia dan keluarga kurang mampu serta perlindungan kepada anak-anak jalanan.
- 4 Pencapaian target yang sudah dicapai oleh Dinas Sosial dalam penanggulangan fakir miskin mencapai 80-90%. Maka dapat diketahui

bahwa Implementasi Peraturan Kementerian Sosial nomor 13 tahun 2016 tentang penanggulangan fakir miskin di Kota Binjai berjalan dengan efektif dan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Sosial nomor 13 tahun 2016.

- 5 Hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan program kegiatan di Dinas Sosial Kota Binjai adalah kurangnya sebagian kecil kinerja dari para pegawai dalam melakukan pelayanan sosial, kurang akuratnya pendataan yang dilakukan kepada fakir miskin serta dana anggaran yang terbatas untuk menanggulangi keadaan fakir miskin.

5.2. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Binjai agar melakukan perencanaan dengan lebih matang, seperti melakukan pendataan terlebih dahulu, mengobservasi mana fakir miskin yang wajib untuk dibantu dan menyesuaikan perencanaan dengan anggaran dana.
- 2 Diharap kepada Dinas Sosial Kota Binjai selain membuka layanan sosial untuk keluhan, kritik dan saran, lebih terjun ke lapangan untuk membantu para pengemis yang sudah lansia, seperti menjalankan program membagi makanan gratis untuk para gelandangan dan lansia yang tinggal di jalanan dan sejenisnya.
- 3 Dari segi bantuan pokok, diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Binjai lebih melakukan pemerataan ke setiap kecamatan agar seluruh fakir miskin

khususnya para lansia yang sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan dapat terbantu dari segi bantuan sandang pangan.

- 4 Pencapaian target, diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Binjai agar dapat mengatasi hambatan dan permasalahan dalam penanggulangan fakir miskin agar pencapaian target pelaksanaan dapat mencapai 100% dan fakir miskin mendapat bantuan yang maksimal.
- 5 Hambatan yang di temui Dinas Sosial Kota Binjai, di harapkan menambah staff/pegawai untuk melakukan pelayanan sosial serta melakukan pedataan fakir miskin dapat mencapai keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Agromedia : Jakarta.
- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Teori*, Jakarta : Rajawali Press.
- Anderson, James. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Caps.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Browne, dan Wildvsky. 2004. *Model Implementasi*. Jakarta : Media Presindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dye, Thomas R. 2007. *Kebijakan Publik*. Caps, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Fredrich, 2007. *Kebijakan Publik*. MandarMaju : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hadjon, Philipus, M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Surabaya : Yuridika.
- Hasby, Tengku Ash-Shiddique. 2006. *Pedoman Zamat*. Semarang : PT. Pustaka Rizky Putra.
- Harsono, hanafi, 2002. *Implementasi Kebijakan Publik dan Politik*. Bandung: Pustaka Buana.
- Harwijaya Dan Triton, TB. 2005. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi Dan Thesis*. Yogyakarta : Pelajar Offset.
- Hasan, Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Imron, M. 2002. *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*. Jurnal.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. MandarMaju. Bandung. CV. Alfabeta.
- Mustopadidadja, Ar. 2002. *Managemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kerja*. Jakarta : Penerbit LAN.

- Moleong, lexy J. 2006 :***Metodologi Penelitian Kualitatif*** .PT. Remaja RosdaKarya : Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2005. ***Penelitian Terapan***. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Noor, Arifin. 2009. ***Ilmu Sosial Dasar***. Bandung : Pustaka Setia.
- Rusli, Said. 2005. ***Ilmu Kependudukan***. Bogor : Pustaka Setia.
- Subarsono, 2005.***Analisa Kebijakan Publik***. PustakaPelajar. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. ***Metode Penelitian Pendidikan : Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D***. Bandung : CV. Alfabeta.
- . 2010. ***Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatid Dan R&D***. Bandung : CV. Alfabeta.
- Susilo, Hartandi, 2007. ***Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini***. Jakarta : Aksara Baru.
- Syaukani, Dr. dkk. 2004. ***Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan***. Yogyakarta : Pustaka Utama
- Tachjan, 2006.***Implementasi Kebijakan Publik***.Bandung : Truen RTH.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003.***Implementasi Kebijakan Publik***. Yogyakarta : Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004,***Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara***. PT. BumiAksara: Jakarta
- . 2001. ***Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Inplementasi Kebijakan Negara Edisi Ke 2***. Jakarta. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012, ***KebijakanPublik (Teori, Proses Dan Study Kasus)***. Yogyakarta : CAPS.
- . 2010. ***Kebijakan Publik Teori Dan Proses***, Yogyakarta : Media Pressindo.
- . 2002. ***Kebijakan Publik Teori Dan Pers***. Yogyakarta : Media Presinndo.

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

A. Identitas Narasumber

Nama	
Alamat	
Umur	
Jenis Kelamin	
Pendidikan	
Divisi Pekerjaan	

B. Daftar Pertanyaan Untuk Dinas Sosial Kota Binjai

No	Kategorisasi	Daftar Pertanyaan
1	Adanya Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1) Untuk merealisasikan visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Binjai, program apa yang disusun dan direncanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai tentang penanggulangan fakir miskin?2) Siapa yang mengatur dan menyusun program tersebut?3) Dapatkah Bapak/Ibu jelaskan bagaimana penyusunan anggaran dana untuk penanggulangan fakir miskin?4) Darimana anggaran tersebut berasal? Apakah pengeluaran dana bersifat berkala atau tidak?5) Untuk membantu program agar berjalan dengan baik, adakah sarana dan prasarana yang disediakan?6) Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan apa saja

sarana dan prasana serta kegunaannya?

2

**Adanya Pelayanan
Sosial**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi kepada fakir miskin untuk program-program yang akan dijalankan?
- 2) Apa saja bentuk sosialisasi yang dijalankan?
- 3) Untuk pelayanan kesehatan dan rehabilitasi, bentuk program pelayanan sosial apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Binjai?
- 4) Apakah Dinas Sosial Kota Binjai bekerja sama dengan pihak lain?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, adakah pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendengar keluhan masyarakat?
- 6) Bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang akses dan kebutuhan masyarakat?

3

**Adanya Bantuan
Pokok**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi bantuan pokok prioritas dari Dinas Sosial Kota Binjai dalam penanggulangan fakir miskin?
- 2) Apa saja program yang dijalankan untuk anak jalanan dan lansia?
- 3) Untuk keluarga tidak mampu, apa saja program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Binjai selain bentuk sosialisasi?
- 4) Adakah penyuluhan atau usaha rumahan untuk membantu pengembangan usaha para

fakir miskin?

- 5) Bagi pendidikan anak-anak, apa saja program yang sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Binjai?
 - 6) Apakah Dinas Sosial Kota Binjai bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjalankan program bantuan untuk anak-anak?
- 4
- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah target utama dari Dinas Sosial Kota Binjai dalam penanggulangan fakir miskin sudah sesuai dengan tujuan utamanya?
 - 2) Berapa persenkah dari target yang sudah direalisasi oleh Dinas Sosial Kota Binjai?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah kinerja dari para pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait penanggulangan fakir miskin sudah efektif?
 - 4) Apa saja kekurangan dan kelebihan para pegawai dalam melaksanakan program kerja tersebut?
 - 5) Menurut Bapak/Ibu, sampai saat ini apa saja yang menghambat program kerja?
 - 6) Bagaimana mengantisipasi kendala/hambatan tersebut agar tidak mengganggu program kegiatan?

Adanya Target:

C. Daftar Wawancara Untuk Fakir Miskin

No	Kategorisasi	Daftar Pertanyaan
1	Adanya Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1) Menurut Bapak/Ibu, apakah Anda tahu mengenai program yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai terkait penanggulangan fakir miskin?2) Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan program tersebut berdampak baik bagi penanggulangan fakir miskin?
2	Adanya Pelayanan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1) Menurut Bapak/Ibu, apa saja pelayanan sosial yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai untuk penanggulangan fakir miskin?2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sistem pelayanan dan para pegawai dalam menjalankan tugas yang dari Dinas Sosial Kota Binjai?
3	Adanya Bantuan Pokok	<ol style="list-style-type: none">1) Menurut Bapak/Ibu, apa saja bantuan pokok yang disediakan dan sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai?2) Menurut Bapak/Ibu, apa bantuan pokok yang sudah Anda dapatkan sebagai fakir miskin?
4	Adanya Target	<ol style="list-style-type: none">1) Menurut Bapak/Ibu, sebagai fakir miskin apakah target kerja yang disosialisasikan oleh Dinas Sosial Kota Binjai sudah mencapai target pelaksanaan?2) Menurut Bapak/Ibu, apa saja hambatan yang didapat baik dari Dinas Sosial Kota Binjai atau Anda sebagai pendapat pelayanan sosial?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : FINA ERIA NASUTION
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 18 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. S. Parman Gg. Harapan Bawah Medan
Anak Ke : 6 dari 6 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Mansyur Nasution
Ibu : Elly Wiyah
Alamat : Jl. S. Parman Gg. Harapan Bawah Medan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 066651 Medan Tahun 2009
2. SMP Yayasan Pendidikan Raksana Medan Tahun 2012
3. SMK Perguruan Panca Budi Tahun 2015
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019

Medan, Oktober 2019

FINA ERIA NASUTION

034

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Medan, 07 DESEMBER 2010

Yth.
 Ibu Ketua Jurusan ...
 UMSU

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : FINA ERA NASUTION
 NPM : 1503100017
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Tabungan sks : ... 22 sks, IP Kumulatif ... 2,96

akan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul Penelitian	Terserius
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai	✓
Implementasi Peraturan daerah no 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di kota Binjai	
Implementasi Peraturan daerah no 54 tahun 2009 tentang kesederhanaan sosial di kota Binjai	

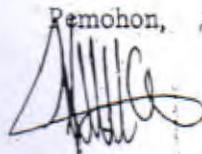
Sesama permohonan ini saya lampirkan :

- bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

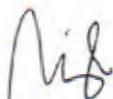
Disetujui oleh Ketua Jurusan :
 dan kepada Dekan untuk
 persetujuan Judul dan Pembimbing.

.....2010

Pemohon,


(FINA ERA NASUTION)

Ketua,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.034/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor
UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan
Surat Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 07 Desember 2018 dengan ini
menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Mahasiswa : **FINA ERIA NASUTION**
: 1503100017
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN
SOSIAL NO.13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS
SOSIAL KOTA BINJAI**

Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Mahasiswa tersebut telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan
yang tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor:
13/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.

2. Judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak
dijerumuskan sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Kadaluarsa tanggal : **07 Desember 2019.**

Ditetapkan di Medan,
Medan, 30 Rabiul Awwal 1440 H
08 Desember 2018 M

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Fakultas Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

ada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU

Medan, 26 JUNI 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : FINA ERIA NASUTION
N P M : 1503100017
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No 875/SK/TL3/UMSU-03/F/2018 tanggal 07 DESEMBER dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN
SOSIAL NO.13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN
DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

Sama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Mengetahui :
Pembimbing



Pemohon,



(FINA ERIA NASUTION)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 533/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2019
W a k t u : 14.00 WIB s/d. selesai
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pckok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ALDEA VISKA	1503100099	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	PENGARUH KOORDINASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DISPERINDAG KOTA BINJAI
2	DWI CAHYANI	1503100110	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGI DI DINAS PERDAGANGAN KOTA BINJAI
3	MUHAMMAD ARI SAPUTRA	1503100065	R. KUSNADI, Drs, M.AP	IDA MARTINELLI, S.SH., M.M.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA CURU DI SMA NEGERI 1 SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4	FINA ERIA NASUTION	1503100017	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
5	REZA MAULANA HIDAYAT	1303100082	IDA MARTINELLI, S.SH., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI QANUN KAB. ACEH TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENGUTIPAN RETRIBUSI SAMPAH DI KECAMATAN BABUSSALAM

Medan, 08 Dzulqaidah 1440 H

11 Juli 2018 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

nama lengkap : FINA ERIA NASUTION
 NPM : 1503100017
 jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 judul Skripsi : Implementasi Kebijakan peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Faktor Risiko didinas sosial Kota Binai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	11 July 2019	Bimbingan pertama. Kesalahan ABSTRAK	
2	14 July 2019	Bimbingan kedua Kesalahan latar belakang Masalah.	
3	16 July	Bimbingan ketiga Kesalahan pembatasan dan Sasaran.	
4	23 July	Penulisan dan penyusunan Kurang rapi.	
5	12 Agust.	Esai Perbaiki cover.	
6	20 Agust.	Kesalahan kategorisasi	
7	22 Agust	Penulisan & Tabel yang kurang rapih dan tidak teratur	
8	27 Agust	Daftar pustaka yang tidak rapih	
9	11 SEPT	Kerangka konsep yang tidak teratur	
10	14 SEPT	Bimbingan Terakhir / <i>122 Meza. ita</i>	

Medan, 14 September 2019.

Dekan,

 Dr. Arifin Saleh, S.Sos, Msp

Ketua Program Studi,

 NALIL KHAIRIAL, S.IP, M.Pd.

Pembimbing I : I

 Dr. Arifin Saleh, S.Sos, Msp.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 746/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : 08.00 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM FENGGUJI			Judul Skripsi
			PENGGUJI I	PENGGUJI II	PENGGUJI III	
1	KHAIRUNISA LUBIS	1503100095	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN
2	FINA ARIA NASUTION	1503100017	IDA MARTINELLY, SH., MM	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
3	ARIS RINALDI	1503100083	IDA MARTINELLY, SH., MM	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NO.1 TAHUN 2008 TENTANG TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENGADAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PT. PLN BINJAI
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Medan, 16 Muharram 1441 H
16 September 2019 M



Ketua,



Panitia Ujian

Sekretaris

PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

d. Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 - 8823619 Fax. 061 - 8823619
Binjai 20717

Binjai, 13 Agustus 2019

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

di-
Medan

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat pemberitahuan penelitian Nomor :
ET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 perihal tersebut diatas,

da :
na : Fina Eria Nasution
M : 1503100017
mat : Jl. Delma Silalas Medan
erajaan : Mahasiswi
: "implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial No
13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota
Binjai".
h : Dinas Sosial Kota Binjai
nya : 2 (dua) Bulan
gung Jawab : Dr. Arifin Saieh, S.Sos.,MSP

Berkontribusi dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan
in sebagai berikut :
tut Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai c/q
ekretaris Daerah Kota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan
esatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai
ng bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/per aturan yang berlaku dan
enjaga keamanan/ketertiban umum.
lambat-lambatnya 1 (satu) Bulan seteah berakhir mengadakan Penelitian
pangan, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa
n Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.

**A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**
SEKRETARIS

Hj. ERNI SISWATI, S.Sos
PEMBINA TKJ
NIP. 196301091986112001

Binjai (sebagai laporan)
Kota Binjai
Binjai
an

PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748
BINJAI - 20714

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 - 6588

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Aman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/memperhatikan Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Nomor: 613/KET/L3-AU/UMSU-93/F/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor: 070 - 1530 tanggal 13 Agustus 2019 Perihal memendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada:

Nama : FINA ERIA NASUTION
NPM : 1503100017
Alamat : Jl. Delma Silalas Medan
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaraan : Indonesia
Judul : **"Implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial No. 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai"**
Peserta : Sendiri
Tempat Penelitian : Dinas Sosial Kota Binjai
Lamanya : 2 (dua) Bulan
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saieh, S.Sos, MSF

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat penelitian.

Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.

Hasil lengkap penelitian sebanyak 2 (dua) set harus sudah diserahkan kepada Walikota Binjai (c.q. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Binjai**) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai dilakukan.

Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 2 (dua) Bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Harus mematuhi ketentuan butir 1 s.d 6

Dikeluarkan di Binjai
pada tanggal 16 Agustus 2019

an. WALIKOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Eria Nasution



M. MAHFULLAH F. DAULAY, S.STP, M.A.P
PEMBINA UPAYA MADYA
NIP. 197109241997111001

Keputusan Yth.:

Bapak Walikota Binjai, sebagai laporan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Kepala Dinas Sosial Kota Binjai.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 83 Telp (061) 8821091

BINJAI - 20717

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 460 - 2658

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NASRULLAH EFENDI, SE
Kategori/Golongan : Pembina Utama Muda
NIP : 19630317 198603 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Binjai

Yang ini menerangkan bahwa :

Nama : FINA ERIA NASUTION
NIM : 1503100017
Status : Mahasiswi
Judul Penelitian : " Implementasi Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial No. 13 Tahun 2011
Tentang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Binjai "

Setelah selesai melaksanakan Riset / Penelitian yang berkenaan dengan judul penelitian tersebut yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 2019 di Dinas Sosial Kota Binjai.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 26 Agustus 2019.



KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

Nashullah Efendi
NASHULLAH EFENDI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630317 198603 1 003